

**PEMBERDAYAAN MADRASAH
DI ERA OTONOMI DAERAH**



Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam

Disusun Oleh

A s r i

0147 0555

**JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A s r i
Nomor Induk : 0147 0555
Jurusan : Kependidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar-gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya sendiri, bukan palagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh Anggota Dewan Penguji.

Yogyakarta, 23 April 2005

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL

Tgl. 20

6000

ENAM RIBU RUPIAH

A s r i

NIM 0147 0555

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. M. Jamroh Latief, M.Si.

Dosen Fakultas Tarbiyah
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudara
Asri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : A s r i

NIM : 0147 0555

Judul : **"Pemberdayaan Madrasah di Era Otonomi Daerah"**

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam.

Harapan kami agar saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 April 2005

Pembimbing,



Drs. M. Jamroh Latief, M.Si.

NIP. 150 223 031

Drs. Suismanto, M.Ag.

Dosen Fakultas Tarbiyah

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS KONSULTAN

Hal : Skripsi Saudara
Asri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Tarbiyah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : A s r i

NIM : 0147 0555

Judul : **"Pemberdayaan Madrasah di Era Otonomi Daerah"**

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam


Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, agama, nusa dan bangsa, amin.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2005

Konsultan,



Drs Suismato M.Ag.
NIP. 150 277 410



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 523056 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN

Nomor: UIN/1/DT/PP.01.1/26/2005

Skripsi Dengan Judul: "**Pemberdayaan Madrasah di Era Otonomi Daerah**"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

A S R I

NIM: 0147 0555

Telah dimunaqosyahkan pada

Hari: Kamis

Tanggal: 19 Mei 2005, dengan Nilai: A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

H. Tulus Mustofa, Lc., MA
NIP 150 275 382

Sekretaris

Drs. Misbah Ulmunir, M.Si
NIP 150 264 112

Pembimbing

Drs. M. Jamroh Latief, M.Si
NIP. 150 223 031

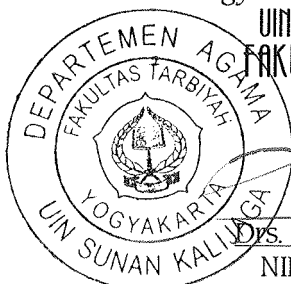
Penguji I

Drs. M. Anis, MA
NIP 150 058 699

Penguji II

Drs. Suisyanto, M.Ag
NIP 150 277 410

Yogyakarta, 23 Mei 2005



UIN SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH
DEKAN

Drs. H. Rahmat, M.Pd.
NIP. 150 037 930

Motto



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات
المجادلة ١١ *

*"The Wise Men Is Who Loves And Reveres God...and you would know
God, be not therefore a solver a riddles rather look about you..." ***

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al Karim*, Jakarta: Depag, 1993, h. 434

² Kahlil Gibran, *The Prophet*, London: William Manneheim, 1926, p. 59, dikutip dari Fahrudin Faiz, *Filosofi Cinta Kahlil Gibran*, Yogyakarta: Tinta: 2002, h. 112.

Persembahan



*Karya Ini Kupersembahkan Untuk
Almamaterku Tercinta
Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي
لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
محمد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده*

Puji syukur Penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga Penulis mampu menyelesaikan proses panjang, melelahkan, dan sekaligus mengasyikkan--penulisan skripsi--ini, tanpa kekuatan dan pikiran yang dianugerahkan-Nya tidak mungkin penulisan ini mencapai tahap penyelesaiannya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan ummat yang mengikuti Beliau...Amiin.

Ungkapan rasa hormat, berhutang budi dan terimakasih yang sedalam-dalamnya, terlebih dahulu ingin Penulis sampaikan kepada mereka yang berjasa, yang tanpa bantuannya tidak mungkin skripsi ini selesai.

1. Dekan Fakultas Tarbiyah, Bapak Drs. H. Rahmat Suyud, M. Pd., selaku pimpinan institusi di mana Penulis menuntut ilmu dan mengasah kemampuan, atas waktu, perhatian, arahan, serta keramahtamahan luar biasa yang beliau berikan sejak Penulis pertama menjadi mahasiswa sampai saat ini. Karena selain sebagai pimpinan fakultas, beliau juga Penasehat Akademik Penulis.
2. Kepada Bapak Drs. M. Jamroh Latief, M. Si., Ketua Jurusan Kependidikan Islam, sekaligus orang yang paling sabar membimbing, meladeni setiap pertanyaan, memberi penjelasan di kala Penulis menemui jalan buntu penulisan skripsi ini. Ketulusan hati dan kedemokratisan beliau menyebabkan Penulis merasa bersemangat dan terpacu untuk menampilkan skripsi ini semaksimal mungkin.

3. Bapak Ibu Dosen yang membimbing proses pembelajaran Penulis selama kuliah, Bapak dan Ibu staf/karyawan di jurusan dan fakultas yang selalu membantu Penulis dalam urusan administrasi.
4. Teristimewa ucapan terimakasih Penulis persembahkan kepada kedua orang tua terkasih di rumah yang senantiasa mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, tanpa lelah mendengarkan setiap keluhan Penulis. Abang, Kakak, keponakan dan Adek Penulis Rifqy Fahrezy Rahman + Rhynnie A. Gustyannie tersayang yang selalu perhatian dengan jalannya perkuliahan Penulis.
5. Keluarga besar Penulis lainnya, Kanda Drs. Edi Yusrianto, M. Ed., & Isalina, SE., M.Pd., Dek Inten dan Djito. Dengan penuh ketulusan mereka selalu memberikan bantuan serta sejak Penulis mulai kuliah sampai saat ini. Mereka jualah yang membuat Penulis mengerti arti sebuah kehidupan.
6. Dan kepada semua pihak yang banyak mengulurkan tangan, memberikan bantuan kepada Penulis baik yang bersifat moril maupun materil yang menjadikan penulisan skripsi ini berjalan lancar. Walaupun Penulis tidak mungkin menyebutkan mereka satu persatu, namun tidak berarti mengurangi peran dan arti mereka di mata Penulis.

Hanya Allah SWT jualah yang akan senantiasa membalas semua perhatian, motivasi dan segala bentuk kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis. Sehingga kelak akan menjadi amal sholeh yang kita butuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita pernah hidup di bumi-Nya ini.

Akhirnya, dengan segenap kemampuan Penulis telah berupaya mempersembahkan yang terbaik, namun sebagai buatan manusia biasa tentu karya ini masih banyak kekurangannya yang perlu mendapatkan koreksi, masukan dan saran konstruktif dari kita semua...semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 2 April 2005
Hormat Penulis,


Asri
NIM 0147 0555

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Nota Dinas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Istilah.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Alasan Pemilihan Judul.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan.....	10
F. Telaah Kepustakaan.....	11
G. Kerangka Teoritik.....	14
H. Metode dan Pendekatan Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MADRASAH.....	22
A. Latar Belakang Lahirnya Madrasah.....	22
B. Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia.....	38
C. Beberapa Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Madrasah.....	47
BAB III PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA.....	60
A. Otonomi Daerah, Undang-undang dan Tantangan Pelaksanaannya.....	60
B. Otonomi Daerah dan Problematika Pendidikan.....	83

C.	Otonomi Daerah dan Pengelolaan madrasah.....	98
BAB IV	UPAYA PEMBERDAYAAN MADRASAH DI ERA OTONOMI DAERAH.....	114
A.	Pemberdayaan Madrasah; Sebuah Solusi.....	114
B.	Kerangka Dasar Pemberdayaan Madrasah.....	118
C.	Pemberdayaan Lembaga dan Fasilitas Madrasah.....	121
D.	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Madrasah.....	132
E.	Pemberdayaan Kurikulum dan Strategi Pembelajaran Madrasah.....	146
F.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat.....	151
BAB V	PENUTUP.....	158
A.	Kesimpulan.....	158
B.	Saran-saran.....	160
C.	Kata Penutup.....	161
DAFTAR PUSTAKA	162
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



SUNAN KALIJAGA UNIVERSITY
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Istilah

Sebagai upaya preventif untuk menghindari salah penafsiran terhadap maksud judul, Penulis merasa perlu memberikan penegasan mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini.

1. Pemberdayaan

Kata “pemberdayaan” (dalam Bahasa Inggris disebut *empowerment/empowering*) berasal dari kata “daya”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “daya” diartikan sebagai tenaga, kekuatan, upaya, kemampuan untuk melakukan usaha, dan lain sebagainya.¹ Seperti dalam kalimat: “Souvenir khas Yogyakarta memiliki daya saing luar biasa di pasar negara-negara tetangga”. Kata daya dalam kalimat di atas menunjukkan arti: mampu, kuat untuk bersaing dengan barang sejenis di pasar negara tetangga.

Dari asal kata “daya” kemudian menjadi “pemberdayaan” yang sering diartikan sebagai sebuah proses memberdayakan untuk mencapai hasil maksimal. Dalam judul skripsi ini kata pemberdayaan mengandung arti bagaimana madrasah seharusnya diberdayakan, dikelola dengan cara dan teknik yang tepat agar menjadi lembaga pendidikan yang baik, maju dan handal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat, Pembinaan & Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. ke 2, 1989, h. 87 Selanjutnya lihat Pius A. Partanto & M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, h. 94.

2. Madrasah

Kata “madrasah” secara etimologis merupakan *isim makan* (Kata keterangan tempat, tempat belajar, dari akar kata *darasa* yang artinya belajar). Dengan kata lain madrasah adalah nama dan sebutan bagi sekolah Islam, tempat proses pembelajaran ajaran Islam secara formal yang mempunyai kelas dan kurikulum dalam bentuk *klassikal*. Padanan kata madrasah dalam Bahasa Indonesia adalah sekolah.²

Madrasah mengandung pengertian tempat, media atau wahana peserta didik mengikuti proses pembelajaran. Maksudnya, di madrasah itulah peserta didik menjalani proses belajar secara terarah, jelas, terpimpin, dan terkendali. Begitulah, secara teknis madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah.³ Hanya saja dalam lingkup kultural, madrasah memiliki konotasi spesifik, di lembaga ini peserta didik memperoleh pembelajaran mengenai hal ihwal atau seluk beluk agama dan keagamaan. Sehingga dalam pemakaiannya, kata madrasah lebih dikenal sebagai sekolah agama.

Kata madrasah juga berarti aliran atau mazhab, yaitu sebutan bagi para ahli yang mempunyai pandangan atau paham yang sama dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, seperti di bidang Hukum Islam (fiqih). Maka dalam literatur kuno Islam sering ditemukan kata-kata madrasah. Oleh para penulis Barat diterjemahkan menjadi *school* atau aliran, seperti Madrasah Maliki, Hanafi, dan Madrasah Hanbali yang sepadan artinya dengan Mazhab Maliki, Hanafi, dan Mazhab Hanbali.

² *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, h. 105.

³ Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, Cet I, 1998, h. 18-19.

Adapun maksud kata madrasah dalam tulisan ini adalah satuan pendidikan jalur sekolah berciri khas Islam, yang diselenggarakan di bawah pembinaan Departemen Agama Republik Indonesia, baik yang berstatus negeri maupun swasta, mulai dari jenjang paling bawah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, sampai ke jenjang tertinggi Madrasah Aliyah.

3. Otonomi Daerah

Dalam Bahasa Inggris, kata otonomi diartikan sebagai *autonomy*, berasal dari Bahasa Yunani *autonomia* yang memiliki beberapa pengertian di antaranya: “*the fact or condition of being autonomous; self government, independence*” dan “*any state that governs it self*”.⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “otonomi” diartikan sebagai “pemerintah sendiri”. Sedangkan otonomi daerah diartikan: hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Pelaksanaan otonomi daerah diatur oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

⁴ Victoria Neufeld & David B. Guralnik, *Webster's New World College Dictionary*, Third Edition, USA: Mac Millan, 1995, p. 98.

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit.*, h. 631.

⁶ *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 1999.

Jadi yang dimaksud dengan Pemberdayaan Madrasah di Era Otonomi Daerah adalah melihat sejauh mana, seperti apa, dan bagaimana seharusnya madrasah dikelola, diberdayakan sesuai dengan kapasitasnya sebagai lembaga pendidikan umat agar eksis dan diperhitungkan sebagai lembaga pendidikan pilihan. Dengan demikian diharapkan madrasah mampu bersaing secara sehat dengan lembaga pendidikan lainnya, baik dari segi manajemen lembaga, fasilitas, *input*, dan *output* yang dihasilkannya dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Karena hakekatnya kedua unsur ini (Lembaga Pendidikan dan Otonomi Daerah) merupakan bagian yang saling terkait, berhubungan, dan dapat mempengaruhi satu sama lainnya.

B. Latar Belakang Masalah

Sistem pengelolaan pendidikan oleh pemerintah selama beberapa periode, mulai dari Orde Lama sampai berakhirnya Orde Baru⁷ yang ditandai dengan runtuhnya kekuasaan pemerintahan Soeharto menunjukkan adanya dominasi pemerintah pusat dalam menentukan semua kebijakan, termasuk dalam bidang pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pendidikan, materi ajar, metode pembelajaran, buku ajar, tenaga pendidikan, baik siswa, guru, maupun karyawan, persyaratan penerimaannya, bahkan pakaian dan jenjang kenaikan pangkatannya diatur oleh pemerintah pusat di Jakarta untuk diberlakukan di seluruh tanah air. Antara sekolah/madrasah yang berstatus negeri

⁷ Gambaran persoalan pendidikan di masa lalu diulas Andrias Harefa,--dalam bahasa sindiran--ia menyebut bahwa pendidikan yang ditopang sistem Demokrasi Terpimpin Orde Lama dan Demokrasi Pancasila Orde Baru sebagai "pendidikan palsu". Menurutnya pendidikan palsu di dua era ini memuja segala sesuatu yang palsu, mulai dari "laporan palsu", "senyum palsu", "gelar palsu", "konflik (rekayasa) palsu", "sistem keuangan palsu", melibatkan "guru-guru palsu", "kurikulum dan mata pelajaran palsu". Sindiran ini cukup menunjukkan adanya ketidakberesan pengelolaan pendidikan pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Lebih lanjut lihat Andrias Harefa, *Pembelajaran di Era Serba Otonomi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001, h. xvi

akan berbeda jauh (dari segi anggaran/subsidi, mutu, dan peminat) dengan sekolah yang berstatus swasta.⁸

Mastuhu juga mensinyalir bahwa secara psikologis pendidikan terkesan sebagai milik pemerintah, bukan milik masyarakat. Semangat atau jiwa pendidikan telah lepas dari jiwa masyarakat. Banyak lembaga pendidikan formal--dari dasar sampai perguruan tinggi--yang terkesan hanya mementingkan status formal, ijazah dan gelar, bahkan dewasa ini banyak terjadi perdagangan gelar, jenjang dan ijazah.⁹

Keterbelakangannya sebagai subsistem pendidikan nasional menyebabkan adakalanya madrasah dipandang sebagai lembaga pendidikan "kelas dua" setelah lembaga pendidikan/sekolah umum. Kenyataan ini memang sulit dipungkiri. Jika dilihat dari segi kuantitas, jumlah madrasah cukup banyak baik yang berstatus negeri maupun swasta (72.650 buah, dengan jumlah siswa 5.633.940.)¹⁰. Namun jika ditinjau dari segi kualitas, mayoritas madrasah dianggap kurang setara dengan sekolah-sekolah umum. Walaupun hakekatnya madrasah juga mempunyai keunggulan tersendiri, namun secara *de facto* jarang diakui. Sebagai contoh, seperti yang dikemukakan Maksum; dimulai sejak sekitar tahun 1978 Rektor IPB meminta beberapa madrasah untuk mengirimkan lulusan terbaiknya sebagai mahasiswa undangan di IPB, dan ternyata mereka mampu memberikan warna baru dalam perkuliahan di IPB, setidaknya dalam menyemarakkan kehidupan keagamaan di kampus tersebut.¹¹

⁸ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Pendidikan Nasional Dalam Abad 21*, Yogyakarta: MSI UII & Safiria Insania Press, Cet. I, 2003, h. 32.

⁹ *Ibid.*, h. 33.

¹⁰ Malik Fadjar, *Op. Cit.*, h. xv.

¹¹ Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos, 1999, h. 152-153.

Persoalan rumit yang dihadapi madrasah jika dilihat secara mikro dan lebih mendetail, akan menambah sederatan fakta ketertinggalan madrasah jika dibandingkan dengan pendidikan umum. Dalam buku yang lain, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Mastuhu mengemukakan fakta bahwa peserta didik dari madrasah pada kenyataannya tetap belum mampu bersaing dengan anak didik dari sekolah umum dalam memasuki Perguruan Tinggi Umum dan lapangan kerja, bahkan kemampuan mereka lebih menurun ketika memasuki Perguruan Tinggi Islam/IAIN.¹²

Senada dengan itu, Malik Fadjar menulis bahwa madrasah (lebih spesifik Madrasah Ibtidaiyah) sampai saat ini masih menghadapi berbagai persoalan-persoalan berat, di antaranya persoalan manajemen yang jauh dari keprofesionalan, etos kerja, perbaikan kualitas dan kuantitas guru, pembenahan sarana dan prasarana fisik/fasilitas, orientasi kurikulum yang masih perlu ditata ulang, jumlah peserta didik yang minim sebagai konsekwensi dari rendahnya mutu pendidikan, belum lagi peserta didik yang mayoritas berlatar belakang sosio-ekonomi rendah dan berasal dari pedesaan.¹³

Kendatipun demikian ternyata perjalanan waktu dan berbagai tantangan yang dihadapinya tidak menyebabkan madrasah serta merta hilang menjadi bagian dari sejarah. Patut dicatat, misalnya ketika pemerintah mencanangkan Gerakan Wajib Belajar pada era 1950-1960 an, tumbuh secara spontan gerakan MWB (Madrasah Wajib Belajar), dan itu cukup berperan dalam membantu pembangunan pedesaan.¹⁴ Keberlanjutan madrasah tetap bisa dipertahankan hingga saat ini, tapi pertanyaannya,

¹² Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999, h. 57-58.

¹³ Malik Fadjar, *Op. Cit.*, h. 40-44.

¹⁴ *Ibid.*, h. 27.

cukupkah madrasah hanya sebatas ada, sementara keberadaannya tidak diperhitungkan?

Sangat pantas jika momentum otonomi daerah yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1999, dimanfaatkan oleh madrasah baik yang berstatus negeri maupun swasta untuk bangkit mengejar ketertinggalan di semua bidang. Apalagi payung hukum yang selama ini membawahi madrasah, yaitu Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) Nomor 2 Tahun 1989, telah diganti (baca: disempurnakan) menjadi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut--secara implisit--kedudukan madrasah disebut sebagai subsistem Pendidikan Nasional, tidak dibedakan dengan sekolah umum lainnya.¹⁵ Prinsip penyelenggaraan pendidikan tidak mengenal kata diskriminasi, menjunjung HAM, nilai-nilai kultur dan keagamaan serta kemajemukan bangsa.¹⁶ Maka kemungkinan dan peluang untuk menerapkan pemberdayaan, membangun, menata, dan memajukan madrasah menjadi lebih besar. Namun, semua ini kembali kepada niat baik dan ketekunan serta keseriusan ummat Islam dan para pengelola madrasah itu sendiri.

Berlakunya otonomi daerah mengingatkan kepada pengalaman lama yang mengajarkan bahwa setiap kebijakan--untuk daerah--yang ditetapkan pusat, sering tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Belum tentu kebijakan yang ditetapkan

¹⁵ Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab VI tentang Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan, antara Madrasah dengan sekolah umum lain tidak dibedakan dalam penyebutannya, lihat lebih lanjut Pasal 17: 2 dan Pasal 18: 3. Pasal 17 menyiratkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) merupakan jenjang pendidikan yang setara dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pasal 18 mengungkapkan bahwa Madrasah Aliyah (MA) setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) setara dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Lihat *Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 17 & 18*, Yogyakarta: Media Wacana, 2003. Selanjutnya lihat Rohendi, "Pesantren Moral dan Revitalisasi Madrasah" dari: <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0904/20/0314.html>. Diakses April 08, 2005 00:20.

¹⁶ Lihat *UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab III Tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan*, Pasal 4: 1.

Jakarta sesuai dengan keinginan *grass root* di pedalaman Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Saat itu kebijakan *top down* pemerintah menjadi suatu yang mutlak bagi daerah, ujung-ujungnya menyebabkan kesenjangan sosial di daerah. Terjadilah paradoks sosial global, daerah yang kaya sumber daya alam tapi nyatanya berpenduduk mayoritas miskin, begitu juga sebaliknya. Jika selama Orde Lama dan Orde Baru jarang kelompok/daerah yang berani menyuarkan aspirasi dengan jujur, itu lebih disebabkan oleh sikap diktator pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakannya.

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan payung hukum terciptanya desentralisasi dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya bidang pendidikan.

Isu desentralisasi pendidikan merupakan implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan tidak terlepas dari kelemahan konseptual dan sistem penyelenggaraan pendidikan, khususnya selama Orde Baru. Di antara masalah dan kelemahan yang sering dibicarakan antara lain adalah: *Pertama*, kebijakan pendidikan nasional yang sangat sentralistik dan serba seragam, pada gilirannya akan mengabaikan realitas kondisi sosial, ekonomi, dan keragaman budaya masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kebijakan pendidikan hampir tidak memberikan ruang gerak kepada daerah untuk membuat kebijakan dan inovasi bidang pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerahnya. *Kedua*, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional lebih berorientasi kepada target-target tertentu,

seperti target penyelesaian kurikulum, pada gilirannya mengabaikan pembelajaran efektif yang mampu mencapai seluruh ranah dan potensi anak didik.¹⁷

Berlakunya otonomi daerah juga menimbulkan berbagai dampak terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah, sebagai subsistem pendidikan nasional, yang harus mengikuti standar dan kebijakan pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Maka akan timbul persoalan baru, yaitu: mampukah madrasah dan pengelolanya memanfaatkan kebijakan tersebut sebagai peluang dan harapan untuk memberdayakan madrasah? Untuk menjawab persoalan tersebut dibutuhkan jawaban, pandangan, dan penilaian yang objektif dan proporsional terhadap kondisi riil pendidikan di madrasah.

Dengan demikian peluang otonomi daerah/desentralisasi pendidikan seharusnya dimanfaatkan pengelola dan masyarakat Islam--yang notabeneanya merupakan masyarakat mayoritas, jumlah umat terbesar di Indonesia--untuk memberdayakan madrasah, dengan melakukan berbagai pembenahan, pengembangan, penyesuaian dan perbaikan yang signifikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan berbagai tinjauan di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan berikut sebagai fokus pembahasan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan madrasah di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, dan bagaimana relevansi serta implikasinya dengan dunia pendidikan, khususnya madrasah?

¹⁷ Azyumardi Azra, "Desentralisasi Pendidikan dan Otonomi Daerah; Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam", *Jurnal At Ta'dib ISID Pondok Modern Gontor Ponorogo*, tt, h. 5.

3. Bagaimana konsep pemberdayaan madrasah di era otonomi daerah ?

D. Alasan Pemilihan Judul

Alasan Penulis memilih judul Pemberdayaan Madrasah di Era Otonomi Daerah terinspirasi oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, madrasah sebagai bagian dari kehidupan dan pranata sosial umat Islam selama ini terkesan ketinggalan, buktinya madrasah sering dianggap sebagai lembaga pendidikan "kelas dua" setelah sekolah umum, banyak orang tua muslim memilih pendidikan umum (bahkan dari sekolah yayasan agama lain) sebagai tempat anak-anak mereka menjalani proses pendidikan.

Kedua, usaha nyata untuk memperbaiki pendidikan di madrasah dalam beberapa kurun waktu terakhir ternyata tidak membuahkan hasil optimal jika dibandingkan dengan apa yang seharusnya dicapai madrasah sesuai dengan posisinya sebagai lembaga pendidikan Islam di negara yang berpenduduk mayoritas muslim.

Ketiga, salah satu usaha untuk memperbaiki citra dan mutu madrasah adalah dengan cara pemberdayaan (*empowerment*), artinya semua potensi, kemampuan, dan beberapa kelebihan harus diberdayakan secara proporsional.

Keempat, berlakunya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan merupakan sebuah kesempatan yang tepat untuk pemberdayaan, membenahi sistem, manajemen, dan peningkatan mutu madrasah agar dapat menjadi lembaga pendidikan terdepan, yang mampu bersaing secara sehat dengan lembaga pendidikan lainnya.

E. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah perkembangan madrasah di Indonesia secara umum.

2. Untuk menjelaskan hubungan dan keterkaitan antara kebijakan otonomi daerah/desentralisasi pendidikan dengan penyelenggaraan pendidikan di madrasah.
3. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan madrasah dilaksanakan, demi mewujudkan madrasah yang maju, handal dan diperhitungkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperkaya wacana dan informasi tentang pengelolaan madrasah.
2. Berguna bagi masyarakat Islam, pemerintah, dan para pengelola pendidikan untuk meningkatkan peran serta dan tanggung jawab mereka dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah, yang pada akhirnya akan melahirkan tekad dan keseriusan untuk menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan terdepan.
3. Berguna bagi para peneliti dan pembaca, baik yang *concern* ataupun yang sekedar berminat terhadap wacana dan masalah-masalah dalam dunia pendidikan Islam, khususnya pendidikan madrasah.

F. Telaah Kepustakaan

Sesuai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini; Pemberdayaan Madrasah di Era Otonomi Daerah, Penulis telah mengumpulkan berbagai informasi kepustakaan mulai dari artikel dan tulisan lepas di beberapa media (koran, majalah, dan internet) sampai kepada buku, jurnal, skripsi, dan thesis, namun penulis tidak menjumpai judul tersebut. Sehingga Penulis sampai kepada kesimpulan bahwa judul tersebut belum ada yang meneliti.

Buku yang secara khusus membahas tentang madrasah, sampai saat ini juga masih sangat minim ditemukan, namun demikian Penulis tidak menafikan ada banyak buku yang membahas tentang pendidikan Islam secara umum. Kenyataan ini dibenarkan oleh Dahlan Hasim dalam kata pengantarnya untuk buku *Madrasah dan Tantangan Modernitas* karya A. Malik Fadjar. Menurut Dahlan Hasim:

“Sekalipun madrasah telah berkembang selama hampir satu abad, yaitu sejak dirintis oleh Abdullah Ahmad dengan Madrasah Adabiyahnya di Padang Panjang pada 1907, sampai sekarang kita masih kesulitan mendapatkan literatur-literatur yang secara khusus membahas madrasah. Buku yang selama ini dianggap sebagai “kitabnya” madrasah, adalah buku *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, yang ditulis oleh Karel A. Steenbrink. Selebihnya, buku yang ada di pasaran lebih mengkonsentrasikan pada pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia, yang secara substantif masih berkisar pada dikotomi pendidikan Islam dan pendidikan umum.”¹⁸

Buku primer (membahas tentang madrasah) dilihat dari segi penjudulan yang penulis temukan hanya ada 3 buah, yakni buku karya Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*, buku karya A. Malik Fadjar, dengan judul *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, serta buku karya H. Maksim, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Sedangkan buku-buku lain yang cukup membantu dan memberikan data masukan terhadap penelitian ini adalah *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, karya Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21* juga ditulis Mastuhu, *Sejarah Pendidikan Islam*, karya Hanun Asrohah, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* karya Muhaimin, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, editor Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak*

¹⁸ A. Malik Fadjar, *Op. Cit.*, h. vii.

Bangsa karya Suyanto & M.S. Abbas, dan buku-buku lain yang memberikan data untuk kelengkapan penelitian ini.

Buku *Madrasah dan Tantangan Modernitas* karya Malik Fadjar dilihat dari segi konsep dan penjabaran tentang bagaimana pemberdayaan dan pengembangan madrasah tergolong sangat bagus, hanya saja data yang ada merupakan data mentah yang perlu dielaborasi lebih lanjut. Selain itu gagasan-gagasannya perlu penyesuaian untuk tiap lingkungan madrasah yang berbeda, karena pada dasarnya perbedaan lingkungan dan *setting* sosial sangat menentukan arah madrasah ke depan.

Sedangkan buku yang secara khusus membicarakan tentang kaitan antara madrasah dan otonomi daerah, sampai saat ini belum Penulis temukan. Hal ini mengingat pelaksanaan otonomi daerah baru berlangsung beberapa tahun, dalam artian pelaksanaannya masih berada pada tahap penyesuaian, "belajar" berotonomi daerah. Di samping itu, madrasah sebagai subsistem pendidikan nasional secara otomatis posisinya (untuk dibahas para ahli) akan lebih kecil dibandingkan dengan permasalahan pendidikan secara umum.

Karya ilmiah seperti skripsi yang membahas tentang madrasah dan otonomi daerah memang Penulis jumpai, yaitu: *Antisipasi Dampak Otonomi Daerah Terhadap Proses Pendidikan Islam (Penelitian Pada MAN Yogyakarta III)* ditulis oleh Durratun Nafisah. Penelitian ini bersifat studi lapangan, terfokus pada bagaimana Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta III mengantisipasi segala kemungkinan dan dampak yang akan ditimbulkan oleh pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini kemudian mengelaborasi lebih lanjut berabagai wacana sampai menghasilkan kesimpulan bagaimana seharusnya peran madrasah agar bisa mengantisipasi setiap

kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan oleh otonomi daerah. Seperti tercantum pada bagian awal penelitian tersebut:

“...secara umum penelitian ini terfokus pada Madrasah Aliyah, membahas dan menganalisis keseluruhan masalah dalam mengantisipasi dampak otonomi daerah yang ada pada madrasah serta solusinya, mengungkap pola hubungan dalam pelaksanaan otonomi daerah antara madrasah dengan dinas-dinas terkait (Pemda dan Depag).”¹⁹

Dari uraian beberapa sumber kepustakaan di atas, Penulis terinspirasi untuk meneliti dan melihat lebih jauh bagaimana seharusnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam diberdayakan secara maksimal sehingga mampu menempatkan dirinya pada tempat yang “lebih terhormat”--mampu bersaing secara sehat, berkualitas handal, maju, menjadi pilihan utama, akuntabilitas dan terdepan--dalam konteks otonomi daerah saat ini.

G. Kerangka Teoritik

Dalam konteks otonomi daerah kewenangan pusat menjadi lebih terbatas jika dibandingkan dengan apa yang dialami Indonesia sejak masa awal kemerdekaan hingga berakhirnya Orde Baru. Dengan luasnya kewenangan diharapkan daerah mampu mengurus dan membangun dirinya, termasuk dalam bidang pendidikan tanpa dominasi campur tangan pemerintah pusat. Inilah salah satu nilai (*value*) dari penerapan otonomi daerah.

Sejak berlakunya otonomi daerah dan sepanjang tahun 2002 wacana otonomi juga mendominasi isu-isu strategis seputar pendidikan, terutama untuk jenjang SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA. Diskursus tersebut berangkat dari semangat

¹⁹ Lebih lanjut lihat Durratun Nafisah, *Antisipasi Dampak Otonomi Daerah Terhadap Proses Pendidikan Islam (Penelitian Pada MAN Yogyakarta III)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003, h. 13.

desentralisasi, yang kemudian membuahkan seuntai harapan akan terwujudnya otonomi pendidikan.²⁰

Berlakunya otonomi daerah dan otonomi pendidikan, merupakan angin segar bagi dunia pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu bagian dari kewenangan yang diserahkan secara penuh kepada daerah. Sesuai dengan arah otonomi, keterlibatan daerah dalam mengurus pendidikan di daerahnya lebih besar, dengan sendirinya komitmen dan usaha untuk memajukan pendidikan di daerah semestinya tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.

Pendidikan Islam yang terkesan agak tertinggal dibandingkan pendidikan umum selama ini,²¹ dengan berlakunya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengejar ketertinggalannya. Namun kesempatan ini juga merupakan sebuah tantangan serius, karena di lain pihak arus modernitas *plus* globalisasi (tidak terbatasnya sistem komunikasi dan informasi yang telah menembus sekat-sekat teritorial antar negara) juga merupakan tantangan serius bagi dunia pendidikan Islam. Semua gejala ini secara otomatis juga menuntut perubahan yang signifikan. Paradigma, sistem, pengelolaan/manajemen, mutu/kualitas pendidikan Islam sudah seharusnya dengan cermat diperhatikan kembali.

Ungkapan bahwa pendidikan merupakan prakarsa pembangunan moral masyarakat²² merupakan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Ketangguhan masyarakat Islam dalam berbagai bidang kehidupan sangat tergantung kepada dunia pendidikan.

²⁰ Seputar masalah otonomi pendidikan diulas dalam Nasrullah Nara, "Jalan Terjal Menuju Otonomi Pendidikan", *Harian Kompas*, Edisi 17 Desember 2002, h. 4.

²¹ Masalah ketertinggalan madrasah sampai dianggap sebagai "kelas dua" diulas oleh Muslih Usa & Aden Wijdan SZ (ed), *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UII & Aditya Media, 1997, h. 20.

²² Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 65-66.

Hal ini disebabkan pendidikan berkaitan langsung dengan aspek paling mendasar sebuah peradaban umat manusia, yaitu mempersiapkan sumber daya manusia (SDM).²³ Apa artinya ketika negeri Islam kaya dengan sumber daya alam dan energi tetapi tidak diimbangi dengan tangguhnyanya kualitas sumber daya manusia?

Di sinilah posisi penelitian ini, yaitu berupaya mengelaborasi wacana bagaimana memanfaatkan peluang otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan untuk pemberdayaan madrasah agar menjadi lembaga pendidikan terdepan, maju, menjadi pilihan utama orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka, handal dalam kualitas *input-out put*, dan unggul dari segi kuantitas.

Untuk menanggulangi berbagai fakta memprihatinkan tentang pendidikan Islam (madrasah), melenyapkan kesan negatif terhadap rendahnya kualitas dan anggapan ketertinggalnya, akan lebih bijaksana jika saat ini dimulai usaha-usaha nyata dan langkah strategis yang dapat diterapkan untuk kemajuan madrasah di masa depan.

H. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kepada jenis *Library Research*, yaitu meneliti beberapa permasalahan yang merujuk kepada bahan kepustakaan sebagai sumber primer. Atau dalam kata lain, penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan dan literatur lainnya.²⁴

Proses pengambilan data meliputi beberapa bagian, di antaranya: *Pertama*, melalui sumber utama (primer) yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun

²³ Paulo Freire, *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, Jakarta: Gramedia, 1984, h. 114.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian I*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1980 h. 3.

1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, selanjutnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai Undang-undang Sisdiknas terbaru yang berlaku, buku *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, karya Malik Fadjar dan *Pemberdayaan Sistem Pendidikan Islam*, karya Mastuhu.

Kedua, melalui sumber sekunder, yaitu informasi yang langsung Penulis kumpulkan, meski hanya sebagai sumber pelengkap namun sangat diperlukan, yaitu; buku Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, karya Zuhairini, dkk., dengan judul yang sama, H. Maksum; *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Karel A. Steenbrink; *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Abuddin Nata; *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, buku Edi Yusrianto; *Lintasan Sejarah Pendidikan Islam (di Indonesia)*, Muhaimin; *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Fasli Jalal & Dedi Supriadi (ed.); *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Mastuhu; *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, Sudarwan Danim; *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, serta literatur-literatur lain seperti jurnal, koran, majalah, dan beberapa situs internet yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada, data yang sudah terkumpul disusun, dijelaskan dan dianalisis.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Kebijakan (*Political Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk melihat, mencermati, menganalisis lebih jauh kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah diberlakukan, terutama kebijakan mengenai otonomi daerah, sistem pendidikan nasional, dan lain-lain. Selanjutnya akan diperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan otonomi daerah, sistem pendidikan nasional, dan bagaimana korelasinya dengan pemberdayaan madrasah secara maksimal agar menjadi lembaga pendidikan handal di era otonomi daerah.

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Jenis pendekatan ini digunakan untuk mengkonstruksi kejadian masa lalu secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, menilai, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesis bukti-bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai kesimpulan yang dapat dipertahankan.²⁶

4. Metode dan Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk membahas masalah dalam penelitian ini adalah:

²⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989, h. 140.

²⁶ Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Rosdakarya, 1984, h. 14.

a. Analisis Isi

Analisis isi adalah suatu analisis penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan memperhatikan konteks karena data yang dibahas belum terstruktur dengan baik.²⁷ Metode ini digunakan untuk menganalisis beberapa persoalan madrasah dan kebijakan umum mengenai pelaksanaan otonomi daerah, pandangan (*Image*) masyarakat terhadap madrasah, dan bagaimana pandangan para ahli berkaitan dengan bagaimana pemberdayaan/pengembangan pendidikan Islam (madrasah) sesuai dengan masalah utama dalam penelitian ini. Dalam menganalisis data yang ada juga dipergunakan metode deduktif dan induktif.

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda/catatan harian, dan sebagainya.²⁸ Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara lebih objektif data-data yang didapat sesuai dengan masalah yang diteliti, sehingga hasilnya dapat memperkuat kesimpulan yang dihasilkan.

c. Komparatif

Metode komparatif adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, dengan meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan antara faktor yang satu

²⁷ Klaus Krippendorff, *Analisa Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, Penerjemah Farid Waiji, Jakarta: Rajawali Press, 1993, h. 13.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 236.

dengan yang lainnya.²⁹ Metode ini digunakan untuk membandingkan secara lebih seksama data yang didapat dengan mempertimbangkan dengan kenyataan, prosedur yang berlaku, dan sebagainya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun penulisan skripsi ini terstruktur sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi penegasan istilah, latar belakang masalah, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah kepustakaan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan madrasah. Dalam bab ini dijelaskan bagaimana lahirnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam khususnya di Indonesia, bagaimana kebijakan pemerintah secara umum dalam beberapa dekade dan masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan saat ini.

Bab III membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah, mulai dari latar belakang lahirnya kebijakan otonomi daerah, Undang-undang Otonomi Daerah, beberapa kebijakan umum dalam pelaksanaan otonomi daerah, kaitannya dengan problematika pendidikan, sampai kepada kemungkinan--dan implikasi--yang harus dihadapi madrasah sebagai konsekwensi pelaksanaan otonomi daerah.

Bab IV intinya membahas tentang bagaimana upaya dan konsep pemberdayaan madrasah agar tampil menjadi lembaga pendidikan handal dalam konteks desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah. Dalam hal ini terlebih dahulu dijelaskan pemberdayaan merupakan solusi dalam memecahkan sekian banyak problematika yang dihadapi madrasah, dan bagaimana kerangka dasar pemberdayaan

²⁹ Winarno Surakhmad, *Op. Cit.*, h. 140.

madrasah. Di bagian terakhir dijelaskan bagaimana seharusnya pemberdayaan madrasah dilaksanakan dan beberapa komponen yang perlu diberdayakan, dalam upaya menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang maju, berkualitas dan akuntabilitas.

Bab V Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran-saran. Secara umum beberapa kesimpulan tersebut akan menjawab bagaimana seharusnya pemberdayaan madrasah dilaksanakan agar mampu tampil sebagai lembaga pendidikan yang lebih maju di era otonomi daerah. Sedangkan saran-saran secara umum ditujukan kepada ummat Islam sebagai penanggung jawab keberlangsungan pendidikan Islam, secara khusus ditujukan kepada pihak-pihak terkait--terutama pemerintah dan yayasan pengelola madrasah--yang dianggap lebih mengetahui dan bertanggung jawab karena terlibat langsung dalam pengelolaan pendidikan di madrasah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian isi skripsi ini (yang merupakan penjabaran dari rumusan masalah), dapat diambil beberapa kesimpulan tentang Pemberdayaan Madrasah di Era Otonomi Daerah, yang pada akhirnya akan mencerminkan keseluruhan garis-garis besar gagasan yang terkandung di dalamnya.

Berikut Penulis menyimpulkan pikiran pokok dalam skripsi ini berdasarkan urutan rumusan masalah yang dikembangkan:

1. Tentang Sejarah Perkembangan Madrasah
 - a) Mayoritas ahli sejarah sependapat bahwa madrasah lahir pertama kali pada abad ke-V H./XI M., yaitu Madrasah Nizhamiyah di Baghdad, yang didirikan atas prakarsa Nizam al-Mulk, perdana menteri Kerajaan Bani Saljuk.
 - b) Di Indonesia, madrasah pertama kali berdiri pada awal abad ke-XX M., yaitu Madrasah Adabiyah di Padang Panjang Sumatera Barat, atas prakarsa Abdullah Ahmad.
 - c) Latar belakang kelahiran madrasah di Indonesia secara garis besar disebabkan oleh faktor-faktor: pembaharuan Islam dan respon terhadap politik pendidikan Hindia Belanda.
 - d) Secara umum kebijakan politik pemerintah Indonesia mulai dari Orde Lama, Orde Baru, dan sampai saat ini cukup mendukung keberadaan madrasah sebagai subsistem pendidikan nasional.

2. Tentang Otonomi Daerah dan Relevansinya Dengan Dunia Pendidikan
 - a) Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.
 - b) Desentralisasi pendidikan mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2001 dan selanjutnya dijamin secara yuridis oleh Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.
 - c) Hakekat desentralisasi pendidikan adalah pemberdayaan lembaga pendidikan.
 - d) Bagi madrasah, otonomi daerah berimplikasi terhadap menguatnya tuntutan agar madrasah dikelola dengan peningkatan mutu dan akuntabilitas, efisiensi, dan melibatkan masyarakat.
3. Tentang Pemberdayaan Madrasah di Era Otonomi Daerah
 - a) Secara yuridis formal madrasah bukan bagian dari desentralisasi pendidikan karena berada di bawah Departemen Agama, namun tidak menghalangi madrasah untuk lebih mandiri, otonom, dan diberdayakan.
 - b) Komponen utama yang harus diberdayakan pada madrasah adalah lembaga dan fasilitas madrasah, sumber daya manusia, kurikulum & strategi pembelajaran, serta partisipasi masyarakat.
 - c) Konsep/kerangka dasar pemberdayaan terhadap komponen utama tersebut berpedoman kepada SWOT yang dimiliki madrasah, sekaligus mengefektifkan dan memaksimalkan fungsi komponen yang ada.
 - d) Pemberdayaan, apapun bentuk dan strateginya tidak akan berdayaguna jika tidak ada kerjasama yang baik antara pemerintah, pengelola

madrasah, masyarakat, dan lembaga non pemerintah yang peduli terhadap madrasah.

B. Saran-saran

Setelah memahami mekanisme, konsep, dan strategi pemberdayaan madrasah, sekaligus melihat kenyataan di lapangan, maka saran-saran yang ingin Penulis sampaikan di sini adalah:

1. Pemerintah seharusnya konsisten menjalankan amanat desentralisasi pendidikan yang telah diatur dalam Undang-undang Sisdiknas, salah satunya dengan mendukung penuh pemberdayaan madrasah.
2. Kreatifitas, inovasi, dan daya tanggap pengelola, sumber daya, dan guru madrasah harus ditingkatkan demi mencapai madrasah yang progressif, bermutu, dan akuntabel.
3. Mengingat masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru, maka ke depan pemerintah, orang tua, dan lembaga peduli pendidikan harus memperhatikan kesejahteraan guru (misalnya kenaikan gaji+insentif) agar mereka bisa berkonsentrasi penuh untuk dunia pendidikan.
4. Peran Dewan Pendidikan, Komite Madrasah, orang tua, dan lembaga peduli pendidikan sebaiknya semakin jelas, tidak hanya berperan dalam tataran wacana dan idealitas, namun realitas peran di lapangan-lah yang dibutuhkan.
5. Pemerintah dan seluruh Pemerintah Daerah agar tidak setengah hati merealisasikan anggaran 20% dari APBN/D untuk anggaran pendidikan, sehingga kekurangan anggaran dan minimnya fasilitas dapat diatasi.
6. Karena minimnya fasilitas yang dimiliki rata-rata madrasah, maka madrasah dituntut seharusnya mampu mengelola dan memanfaatkan secara baik fasilitas yang tersedia.

7. Momentum otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan hendaknya dimanfaatkan pengelola dan sumber daya madrasah untuk mengejar berbagai ketertinggalan dengan tidak menyalahi mekanisme yang berlaku.

C. Kata Penutup

Dengan selesainya pembahasan demi pembahasan dalam skripsi ini, terlihat semakin jelas bahwa masih perlu usaha nyata dari para pengelola madrasah, masyarakat, dan *political will* pemerintah untuk memberdayakan madrasah secara maksimal, mulai dari segi lembaga dan fasilitas, sumber daya manusia, kurikulum dan peran serta masyarakat umum. Di samping itu, usaha-usaha lain khususnya di bidang pemikiran (bagaimana memajukan madrasah) juga masih perlu digalakkan. Dengan demikian akan tercipta keseiringan jalan antara usaha dan konsep yang digunakan dalam memajukan madrasah. Jika bukan saat ini, kapan lagi?

Semoga uraian demi uraian, wacana, dan apapun yang ada dalam skripsi mampu memberikan sumbangan pikiran khususnya terhadap pengembangan madrasah dan pendidikan nasional umumnya.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan, kekurangan dan ketidaklengkapan skripsi ini, maka demi perbaikan--untuk melahirkan pemikiran yang lengkap, holistik, dan integratif--Penulis dengan senang hati menerima berbagai masukan, kritikan, dan saran yang bersifat konstruktif. Kepada mereka yang telah memberikan sumbangsih dan berjasa untuk skripsi ini, Penulis kembali mengucapkan terimakasih. Akhirnya, semoga usaha ini dinilai sebagai ibadah dan bermanfaat bagi semua. Amien!



UNIVERSITY
PADJADJARAN
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Cet. I, Bandung: Mizan, 1998.
- A.W Widjaja, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Abdul Munir Mulkhan, *Nalar Spiritual Pendidikan Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik (Humanisme Religius Sebagai Paradigma Pendidikan Islam)*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ace Suryadi & Dasim Budimansyah, *Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru*, Bandung: Genesindo, 2004.
- Ace Suryadi & H.A.R Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan, Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Ahmad Syalabi, *Al Tarbiyah al Islamiyah; Nuzumuha, Falasafatuha, Tarikhuha*, Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Mashriyah, 1987.
- Agung Prabowo, "Otonomi Daerah dan Masalah Kesenjangan Daerah: Aplikasi Teori Pembagian Kerja dan Teori *Need for Achievement (n-ACH) Mc Clelland*", *Jurnal Paradigma Fakultas ISIPOL UPN Veteran Yogyakarta*, Vol. 7 No. 23, Desember 2003.
- Andar Nubowo & Rosita Susi Aryanti (ed.), *Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pendidikan*, Yogyakarta: LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2004.
- Andrias Harefa, *Pembelajaran di Era Serba Otonomi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001.
- Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Sisdiknas*, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag, 2003.
- Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. Bustami A. Gani dan Djohar Basri, Jakarta: Bulan Bintang, cet. Ke-7, 1993.
- Azyumardi Azra, "Desentralisasi Pendidikan dan Otonomi Daerah; Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam"; *Jurnal At Ta'dib ISID Pondok Modern Gontor Ponorogo*, tt.
- , *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1995.

- , *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, Jakarta: Logos, 1999.
- Cece Wijaya, dkk., *Upaya Pembaharuan Dalam Pendidikan dan Pengajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.
- Darmaningtyas dkk., *Membongkar Ideologi Pendidikan Jelajah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Resolusi Press & Ar-ruzz.
- Dirjen Binbaga Depag RI, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Durratun Nafisah, *Antisipasi Dampak Otonomi Daerah Terhadap Proses Pendidikan Islam (Penelitian Pada MAN Yogyakarta III)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003.
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- , *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. Ke-4, 2004.
- Edi Yusrianto, *Lintasan Sejarah Pendidikan Islam (di Indonesia)*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1998.
- Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Faisal Basri, *Challenges and Opportunities in Regional Autonomy, National Dialogue on Regional Autonomy*, Makalah, Universitas Brawijaya Malang, dari <http://www.pacific.net.id/pakar/sadli/0200/140200.html>. diakses pada 08 April 2005, 00:20.
- Fasli Jalal & Dedi Supriadi, (ed.), *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Fitri Oktarini, "Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah" *Tempo*, November 2004, dari: <http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/11/04/nrs,20041104-01.id.html>, diakses pada 08 April 2005, 00:20.
- H.A. Mustafa & Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Haidar Putra Daulay, *Pesantren, Sekolah dan Madrasah (Tinjauan Dari Sudut Kurikulum Pendidikan Islam)*, Disertasi, PPs IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1991.
- Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999.

- Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988.
- Hisham Nashabe, *Muslim Educational Institution*, Beirut: Librarie du Liban, 1989.
- Hisyam Zaini, dkk., *Strategi Pembelajaran Aktif di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Center Teaching Staff Development "CTSD" IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- , *Desain Pembelajaran di Pergruan Tinggi*, Yogyakarta: Center Teaching Staff Development "CTSD" IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- IP. Smanjuntak, *Perkembangan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Departemen P&K, 1972.
- Iwan Karmawan Arie, *Cikal Bakal Kepemimpinan Amien Rais Legenda Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada & Risalah, 1999.
- J.C. Tukiman Taruna, "Akselerasi Penerapan MBS Internalisasi Pengalaman", *Kompas*, 6 Oktober 2000.
- Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984.
- Jeff Huther & Anwar Shah, "A Simple Measure of Good Governance and Its Application to the Debate on the Appropriate Level of Fiscal Decentralization", *World Bank Policy Research Paper Series No. 1894*, March 1998, Washington DC: World Bank.
- John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Edisi ke 3, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Joko Sudantiko, *Dilema Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2003.
- Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Klaus Krippendorff, *Analisa Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, Terj. Farid Waiji, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Lubna, "Menanti Berkah Otonomi Daerah: Respon Madrasah di Beberapa di Kediri Lombok Barat", *Jurnal Ulumuna STAIN Mataram*, Vol. VII Edisi 12, No. 2 Juli 2003.
- M. Amin Abdullah, dkk., *Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum (Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum)*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2003.
- M. Dawam Rahardjo, (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun Dari Bawah*, Jakarta: P3M, 1985.
- Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Hidakarya Agung, 1979.

- Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos, 1999.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994.
- , *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- , *Menata Ulang Pemikiran Pendidikan Nasional Dalam Abad 21*, Cet. I, Yogyakarta: MSI UII&Safiria Insania Press, 2003.
- Mochtar Naim, "Quo Vadis Pendidikan Madrasah", *Opini Harian Umum Republika*, Edisi 31 Oktober 1996.
- Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, cet. Ke-14, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muchsan, "Kajian Yuridis Undang-undang No. 22 Tahun 1999", *Jurnal Unisia*, No 42/XXIII/1/2000, Januari 2000.
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-3, 2004.
- , *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: PSAPM & Pustaka Pelajar, 2003.
- Muhammad Idrus, "Orientasi Alternatif Bagi Pendidikan Islam" *Jurnal Mukaddimah*, No. 9 Th. VI/2000, Yogyakarta: Kopertais Wilayah III & PTAIS DIY.
- Muslih Usa & Aden Wijdan SZ (ed), *Pendidikan Islam Dalam Peradaban Industrial*, Yogyakarta: Aditya Media & Fakultas Tarbiyah UII, 1997.
- (ed.) *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-4, 2001.
- Nasrul Nara, "Jalan Terjal Menuju Otonomi Pendidikan", *Kompas* Edisi 17 Desember 2002.
- Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Paulo Freire, *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, Jakarta: Gramedia, 1984.
- Pius A Partantanto & M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola 1994.

- Redaktur "Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah"
<http://www.transparansi.or.id/otoda/prinsip.html>., diakses pada 08 April 2005, 00:20.
- , "Otonomi Daerah", Business News Edisi 14 Februari 2000, dari
<http://www.pacific.net.id/pakar/sadli/0200/140200.html>., diakses pada 08 April 2005, 00:20.
- Richard W. Bulliet, *The Patrician of Nishapur: a Study in Medieval Islamic Social History*, Harvard University Press, 1972.
- Riyadi & Deddy Supriady Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Stephanus Roy Rening "RUU Sisdiknas dan Kemungkinan Bubarnya NKRI",
<http://www.mail2.factsoft.de>., diakses pada 06 April 2003.
- Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian I*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1980.
- Suyanto & M.S. Abbas, *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- & Jihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000.
- Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Tadjab, *Posisi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Tesis, PPs IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1987.
- Tim Penyusun Kamus Pusat, Pembinaan & Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. ke 2, 1989.
- Undang-Undang Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 1999.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*, Yogyakarta: Media Wacana Press, 2003.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.

Victoria Neufeld & David B. Guralnik, *Webster's New World College Dictionary*, Third Edition, USA: Mac Millan, 1995.

Wasitohadi & Suharsimi A, "Otonomi Daerah Bidang Pendidikan di Kota Salatiga (Profil, Problematika, dan Strategi Mengatasinya" *Jurnal Penelitian dan Evaluasi, PPs UNY Yogyakarta* No. 7, Tahun VI, 2004.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.

Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-4, 1995.

